



Analisis Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Masyarakat di Kota Kupang

Rila Adu¹, Ari Data², Alfridus Mau Manek³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : rillaadu@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Juni 2026

ABSTRACT

Unemployment and poverty remain structural socio-economic problems in Kupang City. These conditions are influenced by limited formal employment opportunities, low workforce skills, and the mismatch between labor competencies and labor market demands. This study aims to identify the current conditions of unemployment and poverty, analyze the contributing factors, and evaluate the strategies implemented by the local government to address these issues. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observations and in-depth interviews with representatives from the Kupang City Manpower Office, Kupang City Social Affairs Office, and local community members. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon under study. The results showed that the unemployment rate in Kupang City tended to decline during the 2017–2024 period. However, the main challenges remain the mismatch of workforce competencies, the low quality of human resources, and limited access to capital for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Government efforts to address these problems have focused on competency-based training, MSME empowerment, and tourism sector development as a strategic sector for employment absorption. This study concludes that collaboration among the government, private sector, and vocational education institutions is essential to create sustainable employment opportunities and reduce poverty rates in Kupang City..

Keywords: *Public Policy, Poverty, Kupang City, Unemployment, Human Resources.*

ABSTRAK

Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial-ekonomi yang bersifat struktural di Kota Kupang. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pengangguran dan kemiskinan, menganalisis faktor-faktor penyebab, serta mengevaluasi strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang, Dinas Sosial Kota Kupang, serta masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Kupang cenderung mengalami penurunan pada periode 2017–2024. Namun demikian, permasalahan utama masih terletak pada ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja (mismatch), rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pemerintah

daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut difokuskan pada pelatihan berbasis kompetensi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor strategis penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan vokasional sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan serta menekan angka kemiskinan di Kota Kupang.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kemiskinan, Kota Kupang, Pengangguran, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua problematika struktural yang saling berkaitan dan menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional Indonesia (Riski, 2024). Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, ketimpangan ekonomi masih menjadi realitas yang nyata di berbagai daerah (Riasnugrahani, 2024). Pengangguran yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah angkatan kerja berdampak langsung pada penurunan daya beli, yang kemudian menjerat masyarakat ke dalam garis kemiskinan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, serta akses kesehatan dan pendidikan (Hernawati et al., 2025).

Secara nasional, tingkat pengangguran masih didominasi oleh kelompok usia muda dan lulusan pendidikan menengah ke atas akibat adanya ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja atau *mismatch* (Kamim & Khandiq, 2019). Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya sektor formal, sehingga masyarakat beralih ke sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan rentan terhadap kemiskinan (Ramadhani & Supriyanto, 2025). Di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), tantangan ini terasa lebih berat mengingat struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dan kondisi geografis yang menantang (Ariani et al., 2024).

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di NTT, Kota Kupang menghadapi tekanan urbanisasi yang tinggi. Namun, peningkatan populasi ini tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di sektor formal. Dinamika masalah sosial-ekonomi di Kota Kupang dalam kurun waktu delapan tahun terakhir dapat dilihat pada data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2017-2024

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran (%)
2017	9,81	12,50
2018	9,61	10,17
2019	9,22	9,78
2020	8,96	10,90
2021	9,17	9,76

2022	8,61	8,55
2023	8,61	5,69
2024	8,24	8,60
2025	7,57	8,80

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kupang

Mengacu pada tabel di atas, tercatat bahwa rata-rata angka kemiskinan berada pada level 8.90%, sementara pengangguran berada pada angka 9,42%. Meskipun terdapat tren penurunan pengangguran dari 12,50% di tahun 2017 menjadi 8,80% di tahun 2025, lonjakan indikator pada periode 2023–2024 mengindikasikan adanya tekanan ekonomi baru yang perlu diwaspadai. Hal ini dipicu oleh faktor sosial budaya seperti rendahnya motivasi peningkatan keterampilan dan ketergantungan pada bantuan pemerintah (Dwi et al., 2025).

Dalam periode 2017–2025, tingkat kemiskinan di Kota Kupang rata-rata berada pada kisaran 8.90% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 42 ribu jiwa, yang menunjukkan bahwa hampir sepersepuluh penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran rata-rata mencapai 9,42% atau sekitar 22 ribu jiwa, yang mencerminkan masih adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja.

Meskipun demikian, terjadi perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja dari 157.119 menjadi 215.097 orang. Di sisi lain, jumlah pengangguran mengalami penurunan dari 22.442 menjadi 20.247 orang, disertai turunnya tingkat pengangguran dari 12,5% menjadi 8,6%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi tetap berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan.

Ketidakkonsistenan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Kupang mencerminkan adanya hambatan struktural dalam proses transformasi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan hingga tahun 2024, kualitas penyerapan tenaga kerja tersebut masih menjadi catatan kritis karena banyak yang masih terjebak dalam kategori rentan miskin. Kemiskinan yang terjadi seringkali bersifat multidimensional, di mana aspek pendidikan dan motivasi individu menjadi kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan yang bersifat turun-temurun.

Pemerintah Kota Kupang telah mengupayakan berbagai program intervensi seperti bantuan modal usaha dan pelatihan kerja (Ansar, 2025). Namun, efektivitas program tersebut masih terbatas karena belum menyentuh akar permasalahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi terkini pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi strategi penanggulangan yang telah dilakukan. Melalui analisis ini, diharapkan diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi pembangunan ekonomi di Kota Kupang.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menyajikan gambaran sistematis mengenai fenomena pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang tanpa generalisasi populasi (Sugiyono, 2013). Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus observasi pada wilayah Kecamatan Maulafa dan Kelurahan Oebobo sebagai representasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Data yang digunakan mencakup data primer yang dihimpun melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dari elemen masyarakat terdampak serta instansi teknis seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang bersumber dari laporan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2017–2024 serta dokumen resmi pemerintah daerah lainnya. Seluruh instrumen penelitian diarahkan untuk menggali faktor penyebab yang bersifat multidimensional guna memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari lapangan secara faktual dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi yang meliputi observasi partisipatif terhadap kondisi lingkungan pasar kerja informal, wawancara terstruktur, serta studi dokumentasi terhadap laporan berkala daerah. Untuk menjamin analisis yang tajam, prosedur analisis data ini merujuk pada pendekatan Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga komponen utama yang dijalankan secara simultan dan berkelanjutan. Fase awal dimulai dengan reduksi data, yang melibatkan proses penyaringan, penyederhanaan, serta pemusatan data lapangan pada poin-poin yang berkaitan langsung dengan target penelitian. Langkah selanjutnya melibatkan penyajian informasi hasil penelitian dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tren guna memetakan pola hubungan ekonomi serta dampak sosial yang dialami masyarakat. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk merumuskan solusi kebijakan yang aplikatif serta strategis bagi peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Kupang sesuai kaidah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Data mengenai tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang diperoleh melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Sosial Kota Kupang yang merujuk pada publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Perubahan yang terjadi mencerminkan adanya pengaruh berbagai faktor, baik dari sisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, maupun kondisi pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, analisis terhadap data ini menjadi penting untuk memahami perkembangan pengangguran dan kemiskinan secara lebih komprehensif.

Tabel 2 Data Tingkat Kemiskinan di Kota Kupang

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	%
1	2017	40.30	9.81
2	2018	40.51	9.61

3	2019	40.02	9.22
4	2020	39.72	8.96
5	2021	40.35	9.17
6	2022	37.91	8,61
7	2023	38.18	8.61
8	2024	37.53	8.24
9	2025	36.54	7.57

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, BPS Kota Kupang

Mengacu pada perolehan tersebut, tingkat kemiskinan di Kota Kupang selama periode 2017 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan menurun meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Persentase kemiskinan tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebesar 9,81%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi sedikit peningkatan menjadi 9,17%, yang mengindikasikan adanya tekanan ekonomi pada periode tersebut. Setelah itu, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan hingga mencapai titik terendah pada tahun 2025 sebesar 7,57%.

Estimasi tingkat kemiskinan di Kota Kupang secara kolektif berada pada rentang 8–9% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan kondisi ekonomi, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Penurunan yang terjadi mengindikasikan adanya dampak positif dari kebijakan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, namun belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan kesejahteraan di masyarakat.

Tabel 3 Data Tingkat Pengangguran di Kota Kupang

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran (Ribu jiwa)	%
1	2017	22.442	12.50
2	2018	18.408	10.17
3	2019	15.555	9.78
4	2020	24.296	10.90
5	2021	21.700	9.76
6	2022	19.195	8.55
7	2023	12.779	5.69
8	2024	20.247	8.60
9	2025	20.907	8.80

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, BPS Kota Kupang

Merujuk pada tabel 3 diatas, tingkat pengangguran di Kota Kupang selama periode 2017–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi, meskipun secara umum cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 12,50%, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020

terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 10,90%, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada saat itu.

Selanjutnya, tingkat pengangguran kembali menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2023 sebesar 5,69%. Akan tetapi, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi kenaikan kembali hingga berada pada kisaran 8–9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Kota Kupang belum sepenuhnya stabil dan masih rentan terhadap perubahan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kualitas tenaga kerja agar tingkat pengangguran dapat ditekan secara konsisten.

Kondisi Pengangguran di Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi pengangguran di Kota Kupang masih tergolong tinggi dan memiliki karakteristik yang kompleks. Kondisi tersebut dipicu oleh adanya kesenjangan antara total angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Data penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya berbentuk pengangguran terbuka, tetapi juga mencakup pengangguran setengah menganggur, terselubung, struktural, serta musiman.

Fenomena ini terlihat dari masih banyaknya pencari kerja, khususnya lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi, yang belum memperoleh pekerjaan tetap. Di sisi lain, sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah dan jam kerja yang tidak menentu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara statistik termasuk bekerja, namun secara ekonomi belum mampu memenuhi standar kesejahteraan yang layak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pengangguran meliputi terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta tingginya tingkat persaingan. Kondisi ini terjadi karena pasar tenaga kerja belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja secara optimal (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, pengangguran juga dipengaruhi oleh faktor struktural serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sukirno, 2011). Dengan demikian, pengangguran di Kota Kupang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga menyangkut kualitas tenaga kerja serta akses terhadap pelatihan dan informasi pekerjaan.

Kondisi Kemiskinan di Kota Kupang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Kupang masih menjadi permasalahan penting meskipun secara umum mengalami penurunan. Kemiskinan yang terjadi bersifat multidimensional, meliputi kemiskinan kronis, kemiskinan sementara, serta kemiskinan struktural.

Kemiskinan kronis ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Sementara itu,

kemiskinan sementara muncul akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti meningkatnya kebutuhan mendadak. Adapun kemiskinan struktural terjadi karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor informal dengan jenis pekerjaan seperti pedagang kecil, buruh harian, penjahit rumahan, maupun usaha skala kecil lainnya yang tidak memiliki kepastian pendapatan. Pendapatan yang diperoleh cenderung tidak tetap, bergantung pada jumlah pelanggan, kondisi pasar, serta situasi ekonomi yang berubah-ubah. Dalam beberapa kasus, informan menyampaikan bahwa penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, bahkan terkadang tidak mencukupi sehingga mereka harus menunda kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, maupun pembayaran kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok atau menurunnya daya beli masyarakat. Ketidakmampuan rumah tangga atau perorangan dalam membiayai kebutuhan esensial untuk hidup layak menjadi indikator terjadinya kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga dapat bersifat kronis maupun sementara, tergantung pada kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kemiskinan di Kota Kupang bukan sekadar dipicu oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, pelatihan kerja, serta peluang usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penyebab Pengangguran dan Kemiskinan

Identifikasi terhadap faktor penyebab pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang dilakukan melalui teknik observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Hasil studi menunjukkan adanya keterkaitan erat antar variabel penyebab yang saling memengaruhi satu sama lain.

1. Keterbatasan Lapangan Pekerjaan Formal

Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal di Kota Kupang menjadi pemicu utama tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk usia produktif yang pesat setiap tahunnya tidak dibarengi dengan ekspansi sektor industri yang memadai untuk menyerap tenaga kerja secara optimal. Akibatnya, terjadi penumpukan pencari kerja dari kalangan lulusan baru yang akhirnya terpaksa berkompetisi ketat untuk mendapatkan posisi yang sangat terbatas di sektor-sektor formal yang ada saat ini.

Fenomena ini juga berdampak signifikan bagi kelompok usia lanjut yang masih memiliki motivasi kerja tinggi namun kerap tersisih oleh preferensi perusahaan terhadap tenaga muda. Kurangnya program pemberdayaan khusus bagi pekerja senior menyebabkan mereka terjebak

dalam pengangguran atau hanya mengandalkan pekerjaan kecil yang tidak rutin. Minimnya sektor industri manufaktur di Kota Kupang semakin mempersempit peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan tetap yang dapat menjamin stabilitas ekonomi jangka panjang.

2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas keterampilan teknis merupakan hambatan besar bagi pencari kerja di Kota Kupang untuk menembus pasar tenaga kerja yang kompetitif. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan ijazah pendidikan formal tanpa dibekali dengan kompetensi praktis maupun penguasaan teknologi yang dibutuhkan oleh industri modern. Kesenjangan kualifikasi ini menyebabkan perusahaan sulit menemukan tenaga kerja siap pakai, sehingga angka pengangguran tetap tinggi meskipun terdapat lowongan pekerjaan pada posisi tertentu.

Pernyataan dari masyarakat menunjukkan bahwa kurangnya pengalaman kerja dan penguasaan perangkat digital menjadi kendala utama dalam memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana pencari kerja sulit mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan, sementara akses untuk praktik kerja nyata juga terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi melalui pelatihan vokasi yang intensif agar sumber daya manusia di Kota Kupang mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar.

3. Ketergantungan Tinggi pada Sektor Informal

Ketergantungan masyarakat Kota Kupang pada sektor informal, seperti perdagangan kecil dan jasa serabutan, menjadi karakteristik utama struktur ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pilihan ini sering kali diambil sebagai solusi instan karena keterbatasan pendidikan dan persyaratan administrasi yang lebih fleksibel dibandingkan sektor formal. Namun, pekerjaan di sektor ini sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan musim, yang pada akhirnya sering kali menjebak masyarakat dalam kondisi kemiskinan yang terus-menerus.

Para pelaku usaha informal, seperti pedagang gorengan atau buruh harian, sering kali menghadapi masalah pendapatan yang tidak menentu dan ketiadaan jaminan sosial yang layak. Meskipun mereka bekerja dengan durasi waktu yang panjang, Pendapatan yang dihasilkan umumnya sekadar memadai untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti, konsumsi harian tanpa adanya ruang untuk tabungan. Keterbatasan akses terhadap modal usaha dan jangkauan pasar yang lebih luas membuat usaha kecil masyarakat sulit berkembang menjadi usaha produktif yang mandiri.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor fundamental yang membatasi mobilitas vertikal masyarakat di Kota Kupang untuk keluar dari garis kemiskinan. Mayoritas penduduk yang berasal dari keluarga kurang mampu hanya menempuh pendidikan dasar atau menengah, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan kantor yang stabil tertutup. Keterbatasan latar belakang pendidikan ini memaksa mereka untuk

menerima pekerjaan kasar dengan upah rendah yang tidak cukup untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dampaknya terlihat jelas pada sulitnya masyarakat dalam mengakses dan memahami program bantuan atau pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah kota. Kurangnya literasi dan pendidikan dasar membuat inovasi dalam pengembangan usaha mandiri menjadi terhambat, bahkan ketika modal diberikan secara cuma-cuma. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan bermutu menjadi kunci strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan membekali masyarakat dengan kemampuan berpikir kritis dalam berwirausaha.

5. Kebijakan Pemerintah yang Belum Optimal

Kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi dan efektivitas pelatihan kerja produktif di Kota Kupang dinilai masih belum mencapai hasil yang maksimal di lapangan. Beberapa kendala utama meliputi kurangnya sinkronisasi antar lembaga serta rendahnya sosialisasi program kepada masyarakat yang paling membutuhkan informasi tersebut. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kapasitas diri hanya karena ketidaktahuan mengenai prosedur dan waktu pelaksanaan.

Selain itu, kurikulum pelatihan yang ditawarkan sering kali dianggap kurang relevan dengan dinamika kebutuhan pasar kerja lokal dan tren investasi yang masuk. Investasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar karena adanya ketidaksesuaian standar kompetensi. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi kebijakan sangat diperlukan agar program pemerintah dapat menjadi stimulus nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Dampak Urbanisasi dan Migrasi Penduduk

Tingginya laju urbanisasi dan migrasi dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur ke Kota Kupang telah menyebabkan kepadatan pencari kerja yang luar biasa. Para pendatang pindah ke kota dengan ekspektasi besar untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, namun sering kali terbentur pada kenyataan terbatasnya peluang kerja tetap. Hal ini menyebabkan persaingan memperebutkan pekerjaan serabutan menjadi sangat ketat dan memicu pertumbuhan kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah perkotaan.

Fenomena migrasi ini tidak hanya menambah beban pada sektor formal, tetapi juga menekan stabilitas pendapatan di sektor informal karena banyaknya pesaing baru. Masyarakat lokal yang sudah ada sebelumnya merasa semakin sulit bersaing dengan pendatang yang mungkin memiliki kegigihan atau keterampilan yang sedikit lebih unggul. Tanpa adanya kontrol dan penyediaan lapangan kerja di daerah asal maupun di kota tujuan, urbanisasi akan terus menjadi faktor yang memperburuk masalah sosial di Kota Kupang.

Upaya Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi pada Disnakertrans dan Dinsos Kota Kupang, diketahui bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai program untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Program-program tersebut mencakup peningkatan kapasitas tenaga kerja, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, hasil yang dicapai belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program agar dampaknya lebih optimal.

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan kerja menjadi salah satu pendekatan utama dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang. Rendahnya keterampilan praktis serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan banyak masyarakat kesulitan memasuki sektor formal. Pada akhirnya memicu sebagian besar tenaga kerja bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Oleh karena itu, pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja (Faiq & Putra, 2025).

Selain itu, program pelatihan yang diarahkan pada sektor potensial seperti pariwisata, UMKM, perikanan, dan pertanian modern dapat membuka peluang kerja yang lebih luas. Pelatihan yang dirancang secara fleksibel dari segi waktu, biaya, dan akses juga dinilai lebih mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan pemerintah serta keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Dengan demikian, Penguatan kompetensi melalui program pelatihan vokasi yang intensif menjadi kunci strategis dalam mengurangi kemiskinan.

2. Penciptaan Lapangan Kerja melalui Sektor Produktif, Pariwisata, dan UMKM

Pengembangan lapangan kerja melalui sektor produktif, pariwisata, dan UMKM merupakan strategi yang efektif dalam menekan angka pengangguran di Kota Kupang. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang memiliki potensi besar pada sektor industri lokal, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Pemanfaatan potensi tersebut mampu menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat. Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pengembangan sektor ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, optimalisasi sektor unggulan menjadi langkah penting dalam pembangunan ekonomi lokal.

Di samping itu, investasi pada sektor-sektor tersebut turut mendorong perkembangan UMKM melalui pemberian akses modal,

pelatihan, serta perluasan pasar. Keberadaan UMKM memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menciptakan usaha mandiri dengan pendapatan yang lebih stabil. Upaya ini memberikan pengaruh baik dalam mendorong kenaikan tingkat kesejahteraan publik secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan pentingnya investasi dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, sektor produktif memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

3. Kebijakan Pro-Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda dan Perempuan

Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pemberdayaan tenaga kerja muda dan perempuan menjadi langkah strategis dalam mengurangi pengangguran. Kelompok ini sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan keterampilan, pengalaman kerja, serta akses terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kebijakan ini diorientasikan untuk memperkuat kemandirian ekonomi serta mengoptimalkan partisipasi dalam sektor produktif. Dengan adanya kebijakan yang inklusif, diharapkan kelompok ini dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi.

Selain itu, penerapan kebijakan berbasis kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mengakses pelatihan dan peluang usaha. Program pemberdayaan juga mencakup pendampingan usaha serta akses terhadap permodalan bagi pelaku UMKM. Upaya memperbaiki kualitas individu melalui institusi pendidikan dan program pelatihan menjadi kunci utama untuk menstimulus produktivitas para tenaga kerja (Insani et al., 2024). Kebijakan publik juga harus mampu memberikan dampak nyata serta menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung (Amelia, 2025). Dengan demikian, pemberdayaan kelompok ini menjadi bagian penting dalam mengurangi kemiskinan.

4. Pemerataan Infrastruktur dan Investasi Sektor Produktif

Pemerataan pembangunan infrastruktur serta investasi pada sektor produktif seperti perikanan, pertanian modern, dan pariwisata merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesempatan kerja. Infrastruktur yang memadai akan menjamin kemudahan bagi lapisan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap permodalan dan sumber daya ekonomi lainnya dan peluang usaha. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan penopang berupa infrastruktur dan sarana kerja yang memadai agar dapat berjalan optimal.

Di sisi lain, investasi pada sektor unggulan mampu menciptakan efek pengganda yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan sektor unggulan terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya (Kembauw et al., 2017). Selain itu, investasi pada infrastruktur dan kualitas individu memegang peranan krusial dalam mendorong dinamika ekonomi yang berkelanjutan (Azmi & Salmah, 2025). Oleh karena itu, pemerataan pembangunan menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan

5. Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta

Sinergi antara otoritas publik dan pihak swasta merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas program pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah memiliki peran dalam merancang kebijakan dan program, sedangkan sektor swasta berperan dalam menyediakan peluang kerja serta dukungan sumber daya. Kerja sama ini memungkinkan terciptanya program yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan adanya kolaborasi, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antar pihak dalam pembangunan ekonomi.

Disamping itu, kolaborasi ini juga memungkinkan pengembangan program pelatihan kerja, magang, serta kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja muda dan perempuan dapat memperoleh keterampilan yang relevan sehingga lebih mudah terserap di pasar kerja. Pentingnya kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas program publik menjadi indikator penentu bagi keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan publik (Djabbari, 2021). Dengan demikian, kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengangguran di Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan, seperti terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal, meningkatnya jumlah angkatan kerja, serta ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Rendahnya keterampilan praktis dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan sebagian masyarakat lebih banyak terserap pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan tingkat kesejahteraan keluarga. Selain itu, tingkat kemiskinan di Kota Kupang dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan masyarakat, ketidakstabilan penghasilan, tingginya jumlah tanggungan keluarga, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan permodalan usaha. Berbagai kebijakan dan program yang

dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang dan Dinas Sosial Kota Kupang menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi pengangguran dan kemiskinan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bantuan sosial. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana, validitas data penerima program yang belum optimal, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih terintegrasi, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Kota Kupang dapat dilakukan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, D. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 15–23.
- Ansar. (2025). *Analisis program padat karya sebagai strategi pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi di Kelurahan Tondo Kota Palu*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ariani, R., Azhimah, F., Jayadisastra, Y., Bahari, D. I., Abdullah, S., Pramulia, R., & Rachman, R. M. (2024). *Sosial Ekonomi Pertanian*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Azmi, S. H., & Salmah, E. (2025). Analisis Pengaruh Infrastruktur, Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Mataram Periode 2014-2024. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(4), 1095–1103.
- Dwi, I., Rismawati, L., Kaiye, E., & Herlianti, Z. (2025). Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang dengan Tingkat Kematangan Berbeda Sebagai Pupuk Cair pada Pertumbuhan Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens L.*). *Jurnal Teknologi Pangan Dan Agroindustri Perekebunan*, 5(2), 160–166.
- Faiq, A., & Putra, D. A. A. (2025). Pemberdayaan dan Pembangunan: Strategi Masyarakat Madura dalam Meningkatkan Kualitas SDM. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 11(3), 269–275.
- Hernawati, R., Panie, M. Y., Neonufa, S., & Tajuddin, A. I. (2025). The role of family environment and learning motivation in the dropout phenomenon among students in Eastern Indonesia border regions. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.554>
- Insani, S. N., Aulia, F. D., & Safir, N. A. S. A. (2024). Peran Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan. *JUPENSAL*, 1(2), 332–338.
- Kamim, A. B. M., & Khandiq, M. R. (2019). Gojek dan kerja digital: Kerentanan dan ilusi kesejahteraan mitra pengemudi. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 59–73.

- Kembauw, E., Sinay, L. J., & Sahunilawane, A. M. (2017). *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Deepublish.
- Ramadhani, F. M., & Supriyanto, E. (2025). Determinan kedalaman kemiskinan di Kalimantan Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 813–829.
- Riasnugrahani, M. (2024). *Rasa Terpanggil dalam Pekerjaan: Anugerah atau Pencarian*. Ideas Publishing.
- Riski, D. D. (2024). *Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi pada 34 Provinsi di Indonesia*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Makroekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.